

Rahmawati Nilamsari

Skripsi

 Quick Submit

 Quick Submit

 Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta

Document Details

Submission ID

trn:oid::1:3313292343

Submission Date

Aug 14, 2025, 12:31 PM GMT+7

Download Date

Aug 14, 2025, 12:37 PM GMT+7

File Name

KUNTANSI-CEK_PLAGIARISME-212301055-RAHMAWATI_NILAMSARI_copy.docx

File Size

278.5 KB

40 Pages




8,073 Words

53,892 Characters

25% Overall Similarity

The combined total of all matches, including overlapping sources, for each database.

Top Sources

- 23%  Internet sources
- 17%  Publications
- 14%  Submitted works (Student Papers)

Integrity Flags

0 Integrity Flags for Review

No suspicious text manipulations found.

Our system's algorithms look deeply at a document for any inconsistencies that would set it apart from a normal submission. If we notice something strange, we flag it for you to review.

A Flag is not necessarily an indicator of a problem. However, we'd recommend you focus your attention there for further review.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YAN
YOGYAKARTA

Top Sources

- 23% Internet sources
- 17% Publications
- 14% Submitted works (Student Papers)

Top Sources

The sources with the highest number of matches within the submission. Overlapping sources will not be displayed.

1	Internet	text-id.123dok.com	2%
2	Internet	docplayer.info	1%
3	Student papers	Universitas Diponegoro	1%
4	Student papers	Universitas Putera Batam	<1%
5	Internet	repository.uinsaizu.ac.id	<1%
6	Internet	jdih.dprd-diy.go.id	<1%
7	Internet	repository.radenintan.ac.id	<1%
8	Internet	123dok.com	<1%
9	Internet	etd.uinsyahada.ac.id	<1%
10	Student papers	Konsorsium Perguruan Tinggi Swasta Indonesia II	<1%
11	Internet	core.ac.uk	<1%

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

12	Internet	repositori.usu.ac.id	<1%
13	Internet	repository.umi.ac.id	<1%
14	Publication	Yana Kumala Sari Sihalo, Ratna Sari Dewi, Indra Fauzi, Reza Hanafi Lubis. "Pen..."	<1%
15	Student papers	Universitas Negeri Yogyakarta	<1%
16	Student papers	Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia	<1%
17	Internet	journal.lembagakita.org	<1%
18	Internet	lib.ibs.ac.id	<1%
19	Student papers	STIE Perbanas Surabaya	<1%
20	Student papers	LPPM	<1%
21	Student papers	Universitas Ibn Khaldun	<1%
22	Internet	eprints.iain-surakarta.ac.id	<1%
23	Student papers	esap	<1%
24	Student papers	Trisakti University	<1%
25	Internet	jurnalmahasiswa.stiesia.ac.id	<1%

PERPUSTAKAAN
JENDERAL ACHMAD YANI
UNIVERSITAS YOGYAKARTA

26	Student papers	UIN Syarif Hidayatullah Jakarta	<1%
27	Student papers	iGroup	<1%
28	Publication	Sri Jayanti, Henny Andriyani Wirananda. "Pengaruh Penerimaan Pajak Kendaraan..."	<1%
29	Student papers	UIN Walisongo	<1%
30	Internet	jurnal.stiapembangunanjember.ac.id	<1%
31	Internet	azdoc.pl	<1%
32	Internet	es.scribd.com	<1%
33	Internet	prokalteng.jawapos.com	<1%
34	Student papers	Universitas Khairun	<1%
35	Publication	Eka Syofiana, Suwarno Suwarno, Anwar Haryono. "Pengaruh Financial Distress, A..."	<1%
36	Student papers	STIE Mahardhika	<1%
37	Student papers	Universitas Negeri Makassar	<1%
38	Internet	eprints.walisongo.ac.id	<1%
39	Internet	jurnalfe.ustjogja.ac.id	<1%

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

40	Internet	sundari.staff.gunadarma.ac.id	<1%
41	Publication	Musniasih Yuniati, Baiq Salkiah, Yorman Yorman, Firda Silviana. "Dampak Pajak P...	<1%
42	Student papers	Sekolah Tinggi Pariwisata Ambarrukmo Yogyakarta	<1%
43	Internet	conferences.unusa.ac.id	<1%
44	Student papers	UPN Veteran Yogyakarta	<1%
45	Student papers	Universitas Djuanda	<1%
46	Student papers	Universitas Negeri Malang	<1%
47	Internet	digilib.uinkhas.ac.id	<1%
48	Internet	dspace.uii.ac.id	<1%
49	Internet	repository.stei.ac.id	<1%
50	Internet	www.coursehero.com	<1%
51	Publication	Fuad Anwar Maruni, Dwi Partini. "Pengaruh Game Online terhadap Prestasi Sisw...	<1%
52	Publication	Rizma Dwi Mawarni, Widodo Widodo, Nurhidayati Nurhidayati. "Pengaruh Percei...	<1%
53	Internet	eprints.upj.ac.id	<1%

54	Internet	journal.student.uny.ac.id	<1%
55	Student papers	Forum Perpustakaan Perguruan Tinggi Indonesia Jawa Timur	<1%
56	Internet	adoc.tips	<1%
57	Internet	edoc.pub	<1%
58	Internet	eprints.uny.ac.id	<1%
59	Internet	repository.president.ac.id	<1%
60	Publication	Hidyanti Endang Astuti, Shinta Eka Kartika. "Pendapatan Asli Daerah dalam Persp...	<1%
61	Internet	jabar.tribunnews.com	<1%
62	Internet	repo.bunghatta.ac.id	<1%
63	Internet	repositori.ukdc.ac.id	<1%
64	Internet	repository.uin-suska.ac.id	<1%
65	Publication	Mutia Ainul Shintani Abianto. "Kontribusi Pendapatan pada Tenaga Kerja Wanita ...	<1%
66	Internet	eprints.undip.ac.id	<1%
67	Internet	id.123dok.com	<1%

68	Internet	id.scribd.com	<1%
69	Internet	journal.stieamkop.ac.id	<1%
70	Internet	jurnalfai-uikabogor.org	<1%
71	Internet	repositori.uin-alauddin.ac.id	<1%
72	Internet	www.dprd-diy.go.id	<1%
73	Internet	www.rei.or.id	<1%
74	Publication	Azka Amalia, Risanda Budiantoro. "Meningkatkan kepatuhan wajib pajak kendar..."	<1%
75	Publication	Ika Handayani, Kasir. "Pengaruh Struktur Aset, Price to Book Value dan Debt To ..."	<1%
76	Publication	Muh Asdar. "PENGARUH GAYA KEPEMIMPINAN DAN LINGKUNGAN KERJA TERHAD..."	<1%
77	Internet	berita-sanasini.blogspot.com	<1%
78	Internet	dokumen.tips	<1%
79	Internet	ejournal.um-sorong.ac.id	<1%
80	Internet	eprints.pancabudi.ac.id	<1%
81	Internet	eprints.ubhara.ac.id	<1%

82	Internet	journal.ipm2kpe.or.id	<1%
83	Internet	journal.uniba.ac.id	<1%
84	Internet	lib.unnes.ac.id	<1%
85	Internet	pintu.co.id	<1%
86	Internet	repository.stieykpn.ac.id	<1%
87	Publication	Rollis Ayu Ditasari, Muhamad Agus Sudrajat. "Pengaruh Opini Audit dan Temuan ...	<1%
88	Internet	anzdoc.com	<1%
89	Internet	ejournal.unma.ac.id	<1%
90	Internet	eprints.ums.ac.id	<1%
91	Internet	eprints.unisnu.ac.id	<1%
92	Internet	henryleeindonesia.blogspot.com	<1%
93	Internet	id.drderamus.com	<1%
94	Internet	journal.maranatha.edu	<1%
95	Internet	jurnal.pknstan.ac.id	<1%

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

96	Internet	pustaka.pasca.unpad.ac.id	<1%
97	Internet	qdoc.tips	<1%
98	Internet	repository.uinjkt.ac.id	<1%
99	Internet	repository.unifa.ac.id	<1%
100	Internet	www.pusdiklatismap.com	<1%
101	Internet	www.readbag.com	<1%
102	Internet	www.scribd.com	<1%
103	Internet	www.slideshare.net	<1%
104	Publication	Goodwill Desember 2013. "Goodwill Vo. 4 No. 2 Desember 2013", JURNAL RISET AK...	<1%
105	Publication	Dr. Siwi Dyah Ratnasari, SE. MM., Dr. Rina Rahmawati, SE. MM.. "Pengaruh narsis...	<1%
106	Publication	Tri Maryugo Hawati, Rina Oktaviani, A. Faroby Falatehan. "STRATEGI OPTIMALISA...	<1%
107	Internet	www.univ-tridinanti.ac.id	<1%

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

**PENGARUH PAJAK KENDARAAN BERMOTOR, BEA BALIK
NAMA KENDARAAN BERMOTOR, PAJAK BAHAN BAKAR
KENDARAAN BERMOTOR, DAN RETRIBUSI PARKIR
TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH PROVINSI
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA**

SKRIPSI

Diajukan Sebagai Salah Satu Syarat Memperoleh Gelar Sarjana Akuntansi
Fakultas Ekonomi dan Sosial Universitas Jenderal Achmad Yani Yogyakarta



Disusun oleh:

RAHMAWATI NILAMSARI

212301055

**PROGRAM STUDI AKUNTANSI
FAKULTAS EKONOMI DAN SOSIAL
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA
2025**

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Pemerintah daerah memiliki wewenang dalam mengelola dan menata sumber pendapatan serta belanja daerah guna mendukung pembangunan dan pelayanan publik. Hal ini sejalan dengan UU. No 23 Tahun 2014 mengenai Pemerintahan Daerah menjelaskan pemberian kewajiban, hak serta wewenang kepada Pemda dalam menata sendiri kepentingan pemerintahan dan masyarakatnya. Otonomi daerah bertujuan mengembangkan kesejahteraan penduduknya dengan penyediaan layanan secara lebih efisien serta efektif. Dengan kewenangan ini, setiap daerah diharapkan mampu menggali potensi ekonominya sendiri guna mendukung kemandirian fiskal. Keberhasilan pemerintah daerah dalam mengelola keuangan sangat bergantung pada pendapatan yang didapatkan melalui transfer dari pusat serta sumber asli daerahnya.

Pemerintahan daerah memiliki kemampuan untuk mengoptimalkan sumber daya lokal guna meningkatkan pendapatan daerah. Aspek utama desentralisasi fiskal mencakup peningkatan kapasitas keuangan daerah agar dapat menjalankan fungsi pemerintahan secara lebih mandiri. Dengan adanya otonomi fiskal, daerah memiliki kebebasan dalam menentukan kebijakan perpajakan dan retribusi sesuai dengan potensi yang dimiliki. Selain itu, pemerintah daerah dapat menyesuaikan anggaran dengan kebutuhan masyarakat setempat, sehingga kebijakan yang diterapkan dapat semakin efektif serta sesuai sarannya.

Pendapatan daerah berasal dari berbagai sumber yang dikelompokkan ke dalam beberapa kategori utama. Dalam UU No 33 Tahun 2004 mengenai “Perimbangan Keuangan Pemerintah Pusat serta Daerah”, sumber pendapatan daerah terdiri dari Pendapatan Asli Daerah (PAD), dana perimbangan, serta pendapatan lain-lain yang sah. PAD merupakan sumber utama dengan mencerminkan mandiriya suatu daerah, hal ini diperoleh

2 melalui retribusi, pajak, pendapatan dari kekayaan daerah yang dipisahkan, serta PAD sah lainnya. Selain itu, dana perimbangan yang didapatkan dari pemerintah pusat juga berperan penting dalam mendukung anggaran daerah.

100 Pengelolaan pendapatan daerah harus dilakukan secara transparan dan akuntabel agar dapat mendukung pembangunan yang berkelanjutan. Menurut PP No. 12 Tahun 2019 mengenai Pengelolaan Keuangan Daerah, hal ini berisi kewajiban pemerintah dalam melaksanakan prinsip efisiensi, efektivitas, akuntabilitas, serta transparan pada proses mengelola pendapatan juga belanja daerah. Pendapatan daerah yang optimal memungkinkan pemerintah daerah melakukan pembayaran pada sejumlah pelayanan serta program publik, misalnya kesehatan, pendidikan, serta infrastrukturnya.

Pada dasarnya setiap daerah memiliki tantangan yang berbeda dalam mengoptimalkan strategi pengelolaan PAD. Optimalisasi tersebut menjadi faktor krusial dalam meningkatkan kemandirian fiskal suatu daerah supaya tidak menggantungkan seluruh pemenuhan kebutuhannya hanya melalui dana dari pusat. Namun, dalam praktiknya, masih banyak daerah yang menghadapi kendala dalam mengoptimalkan penerimaan PAD, seperti efektivitas pemungutan pajak dan retribusi yang belum maksimal, tingkat kepatuhan wajib pajak yang masih bervariasi, serta kebijakan daerah yang tidak selalu selaras dengan potensi penerimaan yang ada.

73 Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) menjadi salah satu daerah yang menarik untuk dikaji dalam penelitian ini karena memiliki struktur PAD yang didominasi oleh pajak daerah. Berdasarkan laporan Direktorat Jenderal Pajak (2025) yang menyatakan bahwa penerimaan pajak sampai dengan 31 Desember 2024 mencapai Rp 6,804 triliun atau sekitar 100,10% dari target penerimaan pajak yaitu sebesar Rp6,797 triliun. Capaian ini mengalami pertumbuhan positif sebesar 13,00% apabila dibandingkan dengan realisasi penerimaan pajak tahun 2023 pada periode yang sama. Meskipun penerimaan pajak dalam laporan tersebut mencakup berbagai jenis pajak, pajak daerah tetap menjadi komponen utama dalam struktur PAD DIY. Berdasarkan Perda DIY No 6 Tahun 2010 mengenai Pajak Daerah, yang menjadi penyumbang

terbesar dalam struktur PAD DIY, diikuti oleh retribusi daerah dan sumber pendapatan lainnya. Salah satu sektor yang berpotensi dominan untuk mendukung pendapatan dari pajak daerah adalah kendaraan bermotor, mengingat pertumbuhannya di DIY yang terus meningkat.

Tabel 1.1 Jumlah Kendaraan Bermotor di DIY Tahun 2020 – 2024

Jenis Kendaraan	Tahun				
	2020	2021	2022	2023	2024
Mobil Penumpang	171.824	400.627	415.368	433.809	390.483
Bus	4.754	13.398	13.494	13.479	4.501
Mobil Beban	46.817	82.475	124.595	127.062	74.963
Sepeda Motor	1.352.758	2.629.220	2.720.573	2.830.608	2.858.231
Jumlah	1.576.153	3.125.720	3.274.030	3.404.958	3.328.178

Sumber: BPS Provinsi DIY

Melalui data BPS DIY, jumlah kendaraan bermotor di DIY selalu mengalami peningkatan dalam empat tahun terakhir hingga 2023, sebelum mengalami sedikit penurunan pada tahun 2024. Jumlah kendaraan tahun 2020 tercatat sebanyak 1.576.153 unit, kemudian mengalami lonjakan signifikan pada tahun 2021 menjadi 3.125.720 unit, atau meningkat sebesar 98,2%. Pada tahun 2022, jumlah kendaraan kembali meningkat menjadi 3.274.030 unit, atau naik sekitar 4,7% dibandingkan tahun sebelumnya. Tren peningkatan ini terus berlanjut hingga tahun 2023, dengan jumlah kendaraan mencapai 3.404.958 unit, mengalami kenaikan 4% dari tahun 2022. Namun, pada tahun 2024, jumlah kendaraan justru mengalami sedikit penurunan menjadi 3.328.178 unit. Jika dibandingkan dalam kurun waktu lima tahun terakhir, total jumlah kendaraan bermotor di DIY mengalami kenaikan drastis lebih dari 111%. Berdasarkan tabel 1.1, peningkatan jumlah kendaraan ini menunjukkan adanya pertumbuhan yang pesat dalam kepemilikan kendaraan bermotor, yang mencerminkan banyaknya perpindahan penduduk serta berdampak pada peningkatan transportasinya. Meskipun dalam beberapa tahun terakhir jumlah kendaraan cenderung meningkat, penurunan pada tahun 2024 menunjukkan adanya dinamika dalam kepemilikan kendaraan bermotor.

Oleh karena itu, perlu diperhatikan apakah perubahan jumlah kendaraan ini berbanding lurus dengan peningkatan penerimaan retribusi serta pajak daerah dari sektor kendaraan bermotor. Jika tren penurunan ini berlanjut, maka pemerintah daerah perlu menyiapkan strategi untuk menjaga stabilitas pendapatan asli daerah dari sektor ini.

Stewardship Theory menekankan bahwa pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah bertanggung jawab dalam pengelolaan dan memaksimalkan penerimaan pajak demi kepentingan publik. Contohnya penerimaan yang terkait secara langsung pada kendaraan bermotor meliputi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB), Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB), serta retribusi parkir sesuai aturan yang tertera pada UU No 28 Tahun 2009 mengenai Pajak & Retribusi Daerah.

Tabel 1.2 Penerimaan Pajak di DIY Tahun 2020 – 2024

Jenis Pajak	Tahun (Dalam Jutaan)				
	2020	2021	2022	2023	2024
PKB	846.892,57	874.731,43	953.422,13	978.969,04	1.041.662,98
BBNKB	333.512,49	362.977,67	404.968,41	440.843,76	453.957,06
PBBKB	225.462,30	232.244,84	302.161,95	369.593,60	372.113,72
Retribusi Parkir	372,12	681,18	1.537,26	1.760,72	2.853,40

Sumber: BPKA DIY

Kabid Anggaran Pendapatan BPKA DIY, Hidayati Yuliantri Djohar (2023) menegaskan bahwa PKB adalah bagian yang menjadi kontributor terbanyak pada PAD. PKB dikenakan atas kepemilikan serta pemilikan kendaraan yang dipakai di darat. Pajak ini bersifat progresif untuk kendaraan pribadi, karenanya berdampak pada banyaknya kendaraan dimiliki seseorang, tingginya tarif pajak yang dikenakan. Berdasarkan data dari BPKA DIY, penerimaan PKB di DIY menunjukkan tren kenaikan. Jika dilihat dari tahun ke tahun, penerimaan PKB di DIY menunjukkan tren kenaikan yang cukup konsisten, meskipun tidak selalu sebanding dengan jumlah kendaraan bermotor. Pada tahun 2020, penerimaan PKB tercatat sebesar Rp846,89

miliar, lalu naik menjadi Rp874,73 miliar pada 2021, meskipun saat itu jumlah kendaraan melonjak hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Berdasarkan hasil observasi, kesenjangan ini disebabkan oleh dampak pandemi COVID-19 dan adanya kebijakan keringanan pajak. Pada 2022, penerimaan meningkat signifikan menjadi Rp953,42 miliar, dan terus bertambah menjadi Rp978,97 miliar di 2023. Sementara itu, pada tahun 2024, meskipun target yang ditetapkan sebesar Rp982,29 miliar, realisasinya justru melampaui target hingga mencapai Rp1,04 triliun. Data ini menunjukkan tren kenaikan penerimaan PKB mendukung temuan Nurhayati dkk. (2023), menyatakan peningkatan PKB berdampak signifikan pada penerimaan PAD. Hal tersebut menunjukkan bahwa seiring bertambahnya kepemilikan kendaraan bermotor, seharusnya kontribusi PKB terhadap PAD juga meningkat. Meski demikian, realisasi penerimaan PKB masih menghadapi kendala seperti keterlambatan pembayaran pajak dan tingkat kepatuhan wajib pajak yang belum optimal.

BBNKB turut menjadi bagian dari pajak daerah berkaitan dengan kendaraan bermotor, hal ini dimintai setiap terjadi pergantian kepemilikan, baik dalam kondisi baru maupun bekas. Pada tahun 2020, BBNKB tercatat sebesar Rp681,83 miliar, namun turun menjadi Rp567,15 miliar pada 2021. Padahal, di tahun yang sama, jumlah kendaraan bermotor justru meningkat hampir dua kali lipat. Hal ini menunjukkan bahwa tidak semua pertambahan kendaraan berasal dari transaksi jual beli yang dikenai BBNKB. Penurunan tersebut juga bisa dipengaruhi oleh kondisi ekonomi akibat pandemi COVID-19, yang membuat masyarakat menunda pembelian kendaraan baru maupun proses balik nama. Tahun 2022, penerimaan BBNKB kembali meningkat signifikan menjadi Rp734,75 miliar, seiring membaiknya aktivitas ekonomi dan mulai pulihnya pasar kendaraan bermotor. Tahun 2023, realisasi penerimaan BBNKB mencapai sekitar Rp440,84 miliar. Sementara itu, pada tahun 2024, ditargetkan sejumlah Rp423,80 miliar berhasil terlampaui yang realisasinya sejumlah Rp453,96 miliar. Realisasi penerimaan BBNKB yang terus meningkat, bahkan melampaui target pada tahun 2024, menunjukkan bahwa

pajak ini telah dijadikan bagian terpenting dari pendapatan daerah. Seharusnya, dengan meningkatnya transaksi jual beli kendaraan bermotor, kontribusi BBNKB terhadap PAD dapat terus dioptimalkan. Hal tersebut selaras dari hasil riset Febrilia dkk. (2023) dengan menjelaskan BBNKB berdampak signifikan pada peningkatan penerimaan PAD. Walaupun demikian, praktik penghindaran pajak, seperti tidak segera melaporkan perubahan kepemilikan kendaraan, masih menjadi tantangan dalam optimalisasi penerimaan pajak ini.

Seiring meningkatnya mobilitas, pemakaian kendaraan memiliki dampak kepada konsumsi bahan bakar, yang menjadi sumber penerimaan melalui PBBKB. Pajak tersebut harus dibayarkan pada setiap liter bahan bakar yang dibeli oleh pengguna kendaraan bermotor. Mengacu pada laporan dari BPKA DIY, tren penerimaan dari tahun 2020 hingga 2022 juga menunjukkan fluktuasi yang dipengaruhi oleh aktivitas konsumsi bahan bakar. Pada tahun 2020, penerimaan PBBKB sebesar Rp344,69 miliar, kemudian turun menjadi Rp336,80 miliar pada 2021. Penurunan ini dapat dikaitkan dengan pembatasan mobilitas masyarakat selama masa pandemi yang menyebabkan konsumsi bahan bakar menurun. Namun, pada tahun 2022, penerimaan PBBKB kembali meningkat cukup signifikan menjadi Rp430,39 miliar. Kenaikan ini mencerminkan mulai pulihnya mobilitas masyarakat, peningkatan aktivitas transportasi, serta perbaikan sektor ekonomi pascapandemi. Realisasi penerimaan PBBKB pada tahun 2023 tercatat sebesar Rp369,59 miliar. Pada tahun 2024, angka ini meningkat menjadi Rp372,11 miliar, atau naik sekitar Rp2,52 miliar dibandingkan tahun sebelumnya. Selain itu, capaian ini juga melampaui target yang ditetapkan sebesar Rp350 miliar, yang mencerminkan tingginya konsumsi bahan bakar di wilayah tersebut. Peningkatan penerimaan ini selaras pada hasil riset dari Rusli dan Sabri (2023) menunjukkan PBBKB mempunyai pengaruh signifikan pada PAD. Namun, faktor lain seperti kebijakan harga bahan bakar dan pergeseran tren penggunaan kendaraan listrik turut berpengaruh terhadap realisasi pajak ini.

Merujuk pada *Stewardship Theory*, pemerintah daerah memiliki peran dalam mengoptimalkan sumber penerimaan lain selain pajak, salah satunya adalah retribusi parkir, yang dikenakan atas penggunaan fasilitas parkir yang tersedia pada tempat-tempat yang dimiliki oleh Pemda, seperti tepian jalan untuk umum (*on-street parking*) dan tempat parkir khusus yang dikelola pemerintah (*off-street parking*). Peningkatan jumlah kendaraan bermotor di DIY secara langsung meningkatkan kebutuhan akan lahan parkir, terutama di kawasan perkotaan yang memiliki mobilitas tinggi. Penerimaan dari retribusi parkir di DIY sepanjang tahun 2020 hingga 2024 menunjukkan tren fluktuatif dengan kontribusi yang relatif kecil terhadap total PAD. Pada tahun 2020, retribusi parkir tercatat sebesar Rp372,12 juta lalu menurun menjadi Rp681,18 juta pada 2021. Penurunan ini cukup menarik, mengingat pada tahun yang sama jumlah kendaraan bermotor justru melonjak drastis hampir dua kali lipat dibanding tahun sebelumnya. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan jumlah kendaraan tidak otomatis berdampak pada peningkatan retribusi parkir. Pada tahun 2022, penerimaan retribusi parkir kembali meningkat menjadi Rp1,53 miliar, lalu naik menjadi Rp1,76 miliar pada 2023 dan mencapai Rp2,85 miliar pada 2024. Capaian penerimaan yang melampaui target ini mendukung hasil temuan Rachman dkk. (2021) yang menunjukkan adanya pengaruh signifikan retribusi parkir terhadap PAD. Namun, efektivitas penerimaan retribusi ini sangat bergantung pada sistem pemungutan yang diterapkan serta upaya dalam mengatasi potensi adanya pemungutan parkir liar akibat pengelolaan parkir yang belum optimal.

Tantangan dalam optimalisasi pendapatan dari pajak kendaraan bermotor ini menggambarkan keefektifan pemungutan pajak sangat bergantung kebijakan yang diterapkan oleh Pemda. Dalam PP No 55 Tahun 2016 mengenai Ketentuan Umum dan Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah, pemungutannya harus dilakukan secara transparan, akuntabel, dan berkeadilan guna menumbuhkan keinginan warganya untuk melakukan pembayaran pajak. *Stewardship Theory* menegaskan bahwa pemerintah sebagai pengelola keuangan daerah harus bertindak dalam kepentingan

masyarakat guna memastikan bahwa penerimaan pajak dikelola dengan baik dan memberikan manfaat maksimal bagi pembangunan daerah.

Berdasarkan uraian permasalahan diatas, terdapat ketertarikan peneliti dalam melaksanakan penelitian yang berjudul **“Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor, Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor, Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor, dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta”**

B. Rumusan Masalah

Merujuk pada penjelasan dasar permasalahan diatas, fokus permasalahan penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Apakah PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DIY?
2. Apakah BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DIY?
3. Apakah PBBKB berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DIY?
4. Apakah retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DIY?
5. Apakah PKB, BBNKB, PBBKB, dan retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD Provinsi DIY?

C. Tujuan Penelitian

Mengacu pada uraian perumusan masalah diatas, tujuan dari pelaksanaan riset ini yakni, sebagai berikut:

1. Untuk mengetahui pengaruh signifikan PKB terhadap PAD Provinsi DIY.
2. Untuk mengetahui pengaruh signifikan BBNKB terhadap PAD Provinsi DIY.
3. Untuk mengetahui pengaruh signifikan PBBKB terhadap PAD Provinsi DIY.
4. Untuk mengetahui pengaruh signifikan retribusi parkir terhadap PAD Provinsi DIY.

5. Untuk mengetahui pengaruh signifikan PKB, BBNKB, PBBKB, dan retribusi parkir terhadap PAD Provinsi DIY.

D. Manfaat Penelitian

Harapannya pelaksanaan penelitian bermanfaat signifikan baik pada pengembangan ilmu pengetahuan maupun dalam pembangunannya tingkat daerah ataupun lebih luas. Manfaat penelitian ini dapat dijelaskan melalui tiga kontribusi utama: praktis, teoretis, dan kebijakan, sebagai berikut:

1. Praktis

Penelitian ini memberikan manfaat praktis dalam kehidupan sehari-hari terutama bagi pemerintah daerah dan masyarakat. *Output* dari pelaksanaan penelitian harapannya bisa dipakai Pemerintahan Provinsi DIY untuk merumuskan kebijakan yang lebih efektif dan efisien terkait PKB, BBNKB, PBBKB serta retribusi parkir. Peningkatan pemahaman mengenai pengelolaan pendapatan asli daerah diharapkan dapat memperbaiki praktik perpajakan yang ada, memajukan pemahaman masyarakatnya tentang pentingnya membayar pajak dan menaikkan kontribusi masyarakat untuk meningkatkan ekonomi daerahnya.

2. Teoretis

Dari segi teoretis, pelaksanaan penelitian berkontribusi pada peningkatan ilmu pengetahuannya, terutama pada segi ekonomi daerah, perpajakan, serta kebijakan publik. Temuan tersebut diharapkan dapat memberikan sumbangsih terhadap teori-teori yang ada mengenai pengaruh pajak pada PAD serta pengelolaan keuangan daerahnya. Selain itu harapannya juga bisa memperluas wawasan terbaru untuk penelitian selanjutnya yang berfokus pada hubungan antara kebijakan perpajakan dan keberlanjutan pembangunan ekonomi daerah.

3. Kebijakan

Hasil penelitian ini juga memberikan kontribusi yang signifikan dalam proses pembuatan kebijakan publik. Dengan memahami pengaruh pajak PKB, BBNKB, PBBKB serta retribusi daerah kepada PAD-nya, hasil dari pelaksanaan penelitian harapannya bisa dijadikan landasan kuat untuk pemerintah dalam merumuskan kebijakan perpajakan yang lebih tepat sasaran. Selain itu, diharapkan dapat menjadi acuan ketika penyusunan kebijakan untuk dapat menambah PAD dan mendukung pembangunan daerah yang berkelanjutan.

E. Ruang Lingkup dan Batasan Penelitian

Pelaksanaan penelitian berfokus kepada PKB, BBNKB, PBBKB serta retribusi parkir terhadap PAD Provinsi DIY. Pemilihan DIY sebagai lokasi penelitian didasarkan pada tingginya jumlah kendaraan bermotor dan potensi pendapatan dari pajak serta retribusi parkir yang signifikan di daerah tersebut. Periode penelitian dibatasi dari tahun 2020 hingga 2024 untuk melihat bagaimana penerimaan pajak dan retribusi pada sektor kendaraan bermotor yang berkontribusi pada PAD-nya. Rentang waktu ini dipilih untuk mendapatkan representasi yang menyeluruh tentang penerimaan pajak kendaraan serta retribusi parkir dalam berbagai kondisi. Penggunaan data sekunder penelitian dicapai melalui instansi, seperti Badan Pengelola Keuangan dan Aset (BPKA) DIY, Bappeda DIY, Dishub DIY, serta Badan Pusat Statistik (BPS). Batasan lainnya terletak pada metode analisisnya, yaitu menggunakan regresi linear berganda dengan hanya menghitung pengaruh statistik antar variabelnya serta tidak menggali lebih dalam faktor-faktor sosial atau ekonomi yang mungkin berpengaruh terhadap penerimaan PAD.

PERPUSTAKAAN
UNIVERSITAS JENDERAL ACHMAD YANI
YOGYAKARTA

2

BAB III METODE PENELITIAN

A. Desain Penelitian

Pendekatan yang digunakan dalam pelaksanaan penelitian ini adalah kuantitatif. Pendekatan kuantitatif adalah metode dengan dilandaskan kepada filsafat positivisme dan dipakai dalam mengukur keterkaitan antar variabel secara objektif dengan data numerik dan analisis statistik (Sugiyono, 2022). Penelitian kuantitatif memiliki tujuan dalam melakukan pengujian pada hipotesis yang sudah terumuskan sebelumnya memakai analisis teknik statistik yang terstruktur.

B. Definisi Operasional Variabel Penelitian

Operasional variabel merupakan serangkaian pedoman yang jelas mengenai apa yang perlu ditelusuri dan langkah bagaimana mengukur suatu variabel atau konsep dalam penelitian. Operasional variabel bertujuan untuk memastikan keakuratan pengukuran dan biasanya disajikan dalam bentuk tabel yang mencantumkan definisi operasional variabel, indikator, serta skala pengukuran yang digunakan (Rifkhan, 2023). Sesuai dengan judul penelitian ini, maka terdapat 5 variabel utama dalam penelitian ini, yaitu:

80

1. PKB (X_1)
2. BBNKB (X_2)
3. PBBKB (X_3)
4. Retribusi Parkir (X_4)
5. PAD (Y)

Agar mendukung proses pengujian hipotesis, kelima variabel yang telah disebutkan sebelumnya akan diuraikan lebih lanjut dalam tabel berikut:

1

Tabel 3.1 Definisi Operasional Variabel

No	Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
1.	PKB (X_1)	Pajak atas kepemilikan	Realisasi pajak	Jumlah realisasi	Rasio

No	Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
		dan/atau penguasaan kendaraan bermotor (UU Nomor 28 Tahun 2009).		penerimaan PKB	
2.	BBNKB(X_2)	Pajak atas penyerahan hak milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha (UU Nomor 28 Tahun 2009)	Realisasi Pajak	Jumlah realisasi penerimaan BBNKB	Rasio
3.	PBBKB (X_3)	Pajak yang dikenakan atas penggunaan bahan bakar kendaraan bermotor dan alat berat (Peraturan Gubernur DIY Nomor 22 Tahun 2024)	Realisasi Pajak	Jumlah realisasi penerimaan PBBKB	Rasio
4.	Retribusi Parkir (X_4)	Pungutan yang dikenakan oleh pemda terhadap penggunaan fasilitas parkir yang dikelola	Realisasi Retribusi	Jumlah realisasi penerimaan Retribusi Parkir	Rasio

No	Variabel	Definisi Operasional	Dimensi	Indikator	Skala Pengukuran
		secara resmi (UU Nomor 28 Tahun 2009).			
5.	PAD (Y)	Semua hak daerah yang diakui sebagai penambah nilai kekayaan bersih dalam periode anggaran tertentu (UU Nomor 23 Tahun 2014).	Realisasi Pendapatan	Total penerimaan PAD	Rasio

Sumber: Data sekunder yang diolah, 2025

C. Populasi dan Sampel

1. Populasi

Populasi diartikan sebagai seluruh elemen yang mempunyai suatu keunikan dan bisa dijadikan objek kajian untuk penelitian tersebut. Populasi adalah kumpulan data yang berkarakteristik khusus dan sudah ditetapkan peneliti sebagai objek kajian agar bisa dianalisis serta disimpulkan (Kuncoro, 2020). Sementara itu, menurut Azhari dkk. (2023) populasi mencakup keseluruhan unit yang menjadi objek penelitian. Populasi terdiri dari individu-individu dengan karakteristik tertentu yang sudah diputuskan sebelumnya. Populasi dapat berupa suatu kelompok manusia, peristiwa, ataupun benda memiliki kesamaan karakteristik. Secara umum, populasi adalah daerah yang digeneralisasi mencakup subjek dengan suatu karakter serta kualitas yang telah ditentukan peneliti guna mempelajari serta menganalisis lebih lanjut.

Dari definisi yang telah diuraikan sebelumnya, ditunjukkan bahwa populasi tidak ada batasannya bagi manusia, tapi mencakup objek serta elemen alam dengan karakteristik atau sifat tertentu. Selain itu, populasi bukan sekadar didasarkan banyaknya atau kuantitas suatu subjek ataupun objek. Mengacu pada penjelasan tersebut, populasi yang digunakan mencakup data realisasi

penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, Retribusi Parkir, dan PAD DIY tahun 2020 – 2024 sejumlah 60 bulan.

2. Sampel

Sampel adalah komponen kecil yang didapatkan dalam suatu populasi yang lebih besar untuk keperluan penelitian. Menurut Wicaksono (2022), sampel mengakibatkan seorang peneliti melakukan pekerjaannya pada kumpulan yang sedikit serta mempermudah pengelolaan dibandingkan dengan keseluruhan populasinya. Suhardi (2023) menambahkan bahwa sampel merupakan bagian dari karakteristik serta banyaknya populasi yang dipilih melalui prosedur tertentu agar dapat mewakili keseluruhan populasi. Sementara itu, Sugiyono (2022) mendefinisikan sampel sebagai bagian dari karakteristik dan jumlah populasi. Pada pelaksanaan penelitian dengan jumlah populasi luas dapat menyebabkan kendala dalam proses pengolahan data. Oleh karena itu, pengambilan sampel dilakukan untuk memastikan penelitian lebih efisien serta hasil yang diperoleh lebih relevan. Sampel yang digunakan berupa data realisasi bulanan atas penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, Retribusi Parkir, serta PAD di Provinsi DIY periode 2020 – 2024 yang terdiri dari 60 bulan.

3. Teknik *Sampling*

Sugiyono (2022) menyatakan bahwa *sampling* adalah metode yang dipakai ketika pengambilan sampel dalam penelitiannya. Berbagai teknik *sampling* dapat diterapkan, yang secara umum terbagi 2, yakni *non-probability* serta *probability sampling*. Pelaksanaan penelitian menggunakan metode *non-probability sampling*. Lebih lanjut, Sugiyono (2022) menjelaskannya sebagai teknik dalam mengambil sampel dengan tidak memberikan kesamaan *chance* untuk masing-masing elemen dalam populasi agar terpilih sebagai bagian dari sampelnya.

Salah satu cara *non-probability sampling* yang dipakai yaitu *sampling* jenuh. Sugiyono (2022) menjelaskan, sampel jenuh merupakan metode pengambilan sampel di mana seluruh populasi dijadikan menjadi sampelnya. Teknik ini umumnya diterapkan ketika ukuran populasi terbatas atau ketika

peneliti ingin memperoleh data yang lebih menyeluruh dan representatif dengan melibatkan seluruh populasi.

D. Teknik Pengumpulan Data

Priyono dan Abdul (2023) menjelaskan teknik pengumpulan data merupakan cara peneliti dalam mendapatkan data melalui dasar relevan, seperti sampel serta subjek penelitiannya. Proses ini dijadikan bagian dari aspek krusial pada pelaksanaan penelitiannya. Pada pelaksanaan penelitian, teknik dokumentasi digunakan sebagai metode utama pengumpulan data. Sugiyono (2022) mengungkapkan bahwa dokumentasi adalah cara yang dipakai dalam pengumpulan data serta informasi melalui sejumlah sumber tertulis yang dapat berupa arsip, buku, catatan angka, dokumen, serta *image*. Data tersebut berbentuk laporan atau fakta yang bisa membantu pelaksanaan penelitiannya. Perolehan data pada pelaksanaan penelitian ini adalah melalui laporan keuangan daerah serta realisasi pendapatan yang mencakup PKB, BBNKB, PBBKB serta retribusi parkir, yang berperan dalam PAD Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta. Sumber utama data diperoleh dari BPKAD Provinsi DIY.

E. Teknik Analisis Data

Hal ini dijelaskan oleh Rifkhan (2023) sebagai rangkaian proses pada penelitian yang mencakup pemeriksaan, pengolahan, dan pemrosesan data agar menjadi informasi yang valid. Informasi tersebut kemudian ditampilkan pada format yang gampang untuk diketahui peneliti maupun pihak lain, serta dimanfaatkan untuk mencari solusi atas masalah penelitiannya. Model analisis regresi linier berganda digunakan pada pelaksanaan penelitian ini dengan tujuan mengukur sejauh mana dampak PKB, BBNKB, PBBKB serta retribusi parkir pada PAD. Data yang dipakai pada pelaksanaan penelitian akan dilakukan pengolahan menggunakan bantuan aplikasi SPSS dalam memastikan keakuratan hasil analisis. Hipotesis yang diuji menggunakan model regresi, di mana variabel bebas dianalisis

pada variabel terikat guna mengetahui pengaruh yang terjadi. Pelaksanaan penelitian ini memakai model regresi berupa:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_1 + \beta_2 X_2 + \beta_3 X_3 + \beta_4 X_4 + e$$

Keterangan:

Y = PAD

A = Konstanta

B = Koefisien Regresi Berganda

X₁ = PKB

X₂ = BBNKB

X₃ = PBBKB

X₄ = Retribusi Parkir

E = Error

1. Uji Statistik Deskriptif

Sujarweni (2022) menjelaskan statistik deskriptif merupakan metode yang menginterpretasikan keistimewaan data yang didapatkan pada sampel tertentu. Teknik ini mencakup penghitungan berupa median, *mean*, persentil, modus, kuartil, serta desil, baik pada format analisis ataupun visualisasi seperti grafik ataupun bagan. Sementara itu, Sugiyono (2022) menjelaskan statistik deskriptif dipakai dalam menjelaskan data sampel dengan tidak disertai menyimpulkannya bagi populasi secara keseluruhan.

Uji statistik deskriptif dilaksanakan dengan mengetahui gambaran umum atas data yang dipakai pada pelaksanaan penelitiannya. Dengan uji ini, nilai tertinggi, terendah, *mean*, dan standar deviasi setiap variabel penelitiannya dapat diketahui. Analisis tersebut memiliki tujuan memberikan informasi awal mengenai karakteristik data sebelum dilakukan analisis lebih lanjut. Dengan melihat distribusi data, peneliti dapat memahami pola yang ada dan memastikan bahwa data yang digunakan sudah sesuai dengan tujuan penelitian.

2. Uji Asumsi Klasik

Agar penggunaan regresi dapat optimal, diperlukan pengujian asumsi klasik. Hal tersebut memiliki tujuan memastikan bahwa data yang dipakai pada analisis regresi sesuai dengan syarat tertentu, karenanya hasil yang diperoleh dapat dipercaya dan tidak bias. Jika data tidak memenuhi asumsi klasik, maka hasil analisis regresi dapat menjadi tidak valid atau kurang akurat dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

1) Uji Normalitas

Ghozali (2021) menjelaskan bahwa pengujian ini memiliki tujuan dalam menilai ada atau tidaknya residual yang berdistribusi normal pada suatu model regresi. Baiknya model regresi ditandai dengan data yang terdistribusi secara normal. Normalitas dapat diperiksa melalui pola penyebaran titik-titik data pada garis diagonal dalam grafik normal P-P Plot. Data disebut mempunyai distribusi normal ketika menyebar di sekitar garis diagonal atau mengikutinya. Data tidak mempunyai distribusi normal ketika tersebar menjauhi garis diagonal atau tidak sesuai arahnya.

Menggunakan tampilan grafik dapat menyesatkan sebab data sebenarnya tidaklah normal bisa kelihatan normal. Karenanya, pengujian normalitas menggunakan metode *Kolmogorov-Smirnov* yang memiliki tingkat sig 0,05. Pengambilan keputusan didasarkan pada kriteria bahwa data dengan distribusi normal ketika sig bernilai $>0,05$ atau 5%, sedangkan tidak memiliki distribusi normal ketika sig bernilai $<0,05$ atau 5%.

2) Uji Multikolinearitas

Menurut Ghozali (2021), pengujian multikolinearitas dilakukan dalam menentukan apakah terdapat hubungan diantara variabel bebas. Baiknya model regresi ketika tidak memiliki hubungan diantara variabel independennya. Multikolinearitas bisa diidentifikasi melalui hasil toleransi serta VIF. Batas umum digunakan dalam mendeteksi ada tidaknya gejala multikolinearitas yakni *tolerance* bernilai $<0,10$ ataupun VIF memiliki nilai >10 . Kriteria pengambilan keputusan

menyatakan bahwa tidak adanya gejala multikolinearitas ketika *tolerance* bernilai $>0,10$ atau VIF memiliki nilai <10 serta sebaliknya.

3) Uji Heteroskedastisitas

Ghozali (2021) menjelaskan bahwa uji heteroskedastisitas memiliki tujuan menilai ada tidaknya perbedaan varian residual dari setiap pengamatannya pada suatu model regresi. Baiknya model tersebut harusnya bersifat homoskedastisitas ataupun tidak mengalami heteroskedastisitas. Keberadaan heteroskedastisitas ditentukan dengan menganalisis grafik plot antara nilai prediksi variabel dependen (ZPRED) dan residualnya (SRESID). Sumbu Y pada grafik merepresentasikan nilai yang sudah diperhitungkan, serta sumbu X menggambarkan residual dalam bentuk *studentized*. Analisis dasar menunjukkan bahwa heteroskedastisitas dapat diindikasikan tidak ada ketika titik data menyebar di sekitar angka 0 dalam grafik Y dengan tidak membuat suatu pola. Sebaliknya, ketika titik tersebut membuat suatu pola teratur, dapat disimpulkan terjadinya heteroskedastisitas.

4) Uji Autokorelasi

Berdasarkan penjelasan Ghozali (2021) yang mengatakan bahwa pengujian ini digunakan dalam menguji ada tidaknya hubungan di antara kesalahan pengganggu dalam periode tertentu dengan periode sebelumnya (t-1) pada suatu model regresi. Jika ada hubungan itu, maka terjadi masalah autokorelasi yang muncul akibat observasi berlangsung secara beruntun dalam jangka waktu tertentu dan saling terkait. Masalah tersebut timbul dikarenakan residual tidaklah bersifat independen antara satu observasi dengan yang lain. Autokorelasi sering didapatkan dalam data *time series*, di mana gangguan yang dialaminya pada suatu periode dapat memengaruhi individu atau kelompok yang sama di periode berikutnya.

Uji *Durbin-Watson* (DW test) digunakan dalam penelitian ini untuk mendeteksi autokorelasi tingkat pertama (*first order autocorrelation*). Pengujian hanya dapat digunakan jika model

mempunyai konstanta serta tidaklah mengandung variabel independen tambahan diantara variabel yang diuji.

3. Uji Hipotesis

1) Uji Simultan (Uji F)

Pengujian ini dipakai dalam menentukan ada tidaknya variabel bebas yang dengan bersamaan berpengaruh pada variabel terikatnya. Jika nilai $F\text{-hitung} > F\text{-tabel}$, ditolaknya hipotesis nol (H_0) serta diterimanya hipotesis alternatif (H_1), menunjukkan bahwa semua variabel bebas dengan simultan berpengaruh signifikan pada variabel terikatnya pada tingkatan sig sebesar 5%. Keputusan yang diambil didasarkan pada besarnya hasil probabilitas, di mana variabel independen memiliki pengaruh signifikan jika probabilitasnya < 0.05 (Ghozali, 2021).

2) Uji Koefisien Determinasi (R^2)

Pengujian R^2 dipakai dalam mengukur jangkauan suatu model mampu menggambarkan variasi dalam variabel dependennya. Besar R^2 berkisar di antara 0 hingga 1. Ketika R^2 bernilai rendah, berarti variabel independennya hanya mampu menggambarkan variasi dalam variabel dependen dalam skala yang tertentu. Sebaliknya, ketika nilainya mencapai 1, berarti variabel independennya memberi hampir seluruh informasi diperlukan dalam menjelaskan variabel dependennya (Ghozali, 2021).

3) Uji Parsial (Uji t)

Uji-t dipakai dalam melakukan pengukuran jangkauan 1 variabel independen dengan parsial memengaruhi variabel dependennya (Ghozali, 2021). Pengambilan keputusan berdasarkan hasil uji ini ialah: ketika $t\text{-hitung}$ bernilai $>$ dari $t\text{-tabel}$ ataupun probabilitas bernilai $<$ Sig (0.05), artinya variabel independen memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependennya. Sebaliknya, ketika $t\text{-hitung}$ bernilai $<$ $t\text{-tabel}$ ataupun probabilitasnya $>$ Sig (0.05), berarti variabel independennya tidak memiliki pengaruh signifikan pada variabel dependennya.

BAB IV

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

A. Deskripsi Data

Penelitian ini berfokus pada Provinsi DIY sebagai populasi. Data yang diterapkan mencakup realisasi bulanan penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, retribusi parkir, dan PAD selama periode 5 tahun, yakni sejak tahun 2020 hingga 2024. Penentuan sampel dilakukan melalui penerapan metode *sampling* jenuh, yaitu teknik pengambilan sampel di mana seluruh anggota populasi dijadikan sebagai sampel penelitian. Rincian pengambilan sampel dapat dilihat melalui tabel berikut:

Tabel 4.1 Distribusi Sampel Penelitian

Keterangan	Total
Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta yang menerbitkan data realisasi bulanan atas penerimaan PKB, BBNKB, PBBKB, Retribusi Parkir, dan PAD untuk periode 2020 – 2024	12
Total Periode	5
Total sampel yang digunakan	60

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Sebagaimana ditunjukkan dalam Tabel 4.1, terdapat 60 sampel yang dapat dimanfaatkan.

B. Hasil Analisis

1. Hasil Analisis Regresi Linier Berganda

Pengujian regresi linier berganda diimplementasikan untuk mengetahui sejauh mana pengaruh yang ditimbulkan oleh variabel independen dalam penelitian ini. Adapun hasil pengolahan regresi linier berganda yang dilaksanakan dengan bantuan *software* SPSS versi 30, tersaji pada tabel berikut.

Tabel 4.2 Hasil Regresi Linier Berganda

Variabel	B	beta	t hitung	Sig t
(Constant)	1.349		1.069	0.290
PKB	0.333	0.282	2.952	0.005
BBNKB	0.291	0.274	2.770	0.008
PBBKB	0.277	0.310	2.734	0.008
Retribusi Parkir	0.044	0.148	1.425	0.160
F hitung	31.742			
Sig F	<0.001 ^b			
R Square	0.676			
Variabel Dependen	PAD			

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Merujuk pada hasil data yang telah diolah, nilai yang digunakan untuk membentuk model regresi linier berganda dalam tabel tersebut berasal dari kolom B. Dari proses analisis diperoleh nilai konstanta sebesar 1.349. Adapun nilai koefisien untuk setiap variabel independen adalah sebagai berikut: variabel PKB 0.333, variabel BBNKB sebesar 0.291, variabel PBBKB sebesar 0.277, dan variabel Retribusi Parkir sebesar 0.044. Berdasarkan nilai-nilai tersebut, maka model regresi linier berganda yang terbentuk adalah sebagai berikut:

$$\text{Pendapatan Asli Daerah} = 1.349\alpha + 0.333 \text{ PKB} + 0.291 \text{ BBNKB} + 0.277 \text{ PBBKB} + 0.044 \text{ Retribusi Parkir} + e$$

Dari model tersebut, dapat dijelaskan beberapa interpretasi sebagai berikut:

- 1) Nilai konstanta sebesar 1.349 mengindikasikan bahwa apabila seluruh variabel independen bernilai nol, maka nilai PAD diperkirakan sebesar 1.349 satuan.
- 2) Koefisien regresi PKB yang bernilai positif sebesar 0.333 menunjukkan bahwa setiap kenaikan PKB sebesar satu satuan akan memberikan kontribusi peningkatan terhadap PAD sebesar 0.333, dengan asumsi variabel lainnya dalam kondisi tetap.

- 3) Koefisien regresi BBNKB sebesar 0.291 juga menunjukkan pengaruh positif, yang berarti bahwa peningkatan satu satuan pada BBNKB akan meningkatkan PAD sebesar 0.291, jika variabel lain tidak berubah.
- 4) Koefisien regresi PBBKB sebesar 0.277 menunjukkan bahwa setiap kenaikan satu satuan pada PBBKB akan memberikan dampak peningkatan PAD sebesar 0.277, dengan asumsi variabel lain bersifat konstan.
- 5) Terakhir, koefisien regresi Retribusi Parkir yang bernilai 0.044 menandakan bahwa setiap peningkatan Retribusi Parkir sebesar satu satuan akan mendorong kenaikan PAD sebesar 0.044, apabila variabel lainnya tidak mengalami perubahan.

2. Hasil Analisis Statistik Deskriptif

Berdasarkan pendapat Ghozali (2021), analisis statistik deskriptif ditujukan untuk memberikan gambaran umum mengenai data melalui sejumlah ukuran statistik seperti nilai mean, varians, nilai maksimum dan minimum, sum, range, kurtosis, dan skewness. Pengujian deskriptif ini dilakukan untuk menyederhanakan penyajian data, sehingga informasi yang dihasilkan menjadi lebih mudah dipahami. Adapun hasil analisis statistik deskriptif tertera pada tabel 4.2 berikut:

Tabel 4.3 Hasil Uji Analisis Deskriptif

	N	Minimum	Maximum	Mean	Std. Deviation
PKB	60	51628507950.00	121446599600.00	78261302550.8333	13247587053.19683
BBNKB	60	14161921100.00	59410767900.00	33270989860.0000	7602769739.91631
PBBKB	60	12832933666.00	34099120094.00	25026273712.6403	5889210816.78334
Retribusi	60	6268000.00	282277000.00	120078575.0000	76076126.87830
PAD	60	83244313223.85	273540603381.93	181512481012.8817	45499634790.43958

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan tabel tersebut, diketahui bahwa jumlah total sampel yang digunakan dalam penelitian ini sebanyak 60, yang terdiri dari data realisasi bulanan PKB, BBNKB, PBBKB, retribusi parkir, dan PAD periode 2020 hingga 2024. Penjelasan lebih rinci mengenai setiap variabel yang telah dianalisis dapat dilihat pada tabel 4.3 berikut:

a. Variabel Independen

- 1) Dilihat dari tabel 4.3 data analisis deskriptif PKB memiliki nilai paling rendah yaitu 51628507950.00, sedangkan untuk nilai paling tinggi berada di angka 121446599600.00, dan untuk rata-rata sebesar 78261302550.8333. Sedangkan, nilai standard deviasinya berada di angka 13247587053.19683, yang di mana nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata variabel, yang mengartikan bahwa hasil penyebaran data berindikasi baik.
- 2) Hasil analisis deskriptif BBNKB memiliki nilai paling rendah yaitu 14161921100.00, sedangkan untuk nilai paling tinggi berada di angka 59410767900.00, dan untuk rata-rata sebesar 33270989860.0000. Sedangkan, nilai standard deviasinya berada di angka 7602769739.91631, yang di mana nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata variabel, yang mengartikan bahwa hasil penyebaran data berindikasi baik.
- 3) Data dari analisis deskriptif PBBKB memiliki nilai paling rendah yaitu 12832933666.00, sedangkan untuk nilai paling tinggi berada di angka 34099120094.00, dan untuk rata-rata sebesar 25026273712.6403. Sedangkan, nilai standard deviasinya berada di angka 5889210816.78334, yang di mana nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata variabel, yang mengartikan bahwa hasil penyebaran data berindikasi baik.
- 4) Sementara itu, data hasil analisis deskriptif retribusi parkir memiliki nilai paling rendah yaitu 6268000.00, sedangkan untuk nilai paling tinggi berada di angka 282277000.00, dan untuk rata-

rata sebesar 120078575.0000. Sedangkan, nilai standard deviasinya berada di angka 76076126.87830, yang di mana nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata variabel, yang mengartikan bahwa hasil penyebaran data berindikasi baik.

b. Variabel Dependen

Data analisis deskriptif dari variabel dependen yaitu PAD menunjukkan nilai paling rendah yaitu 83244313223.85, sedangkan untuk nilai paling tinggi berada di angka 273540603381.93, dan untuk rata-rata sebesar 181512481012.8817. Sedangkan, nilai standard deviasinya berada di angka 45499634790.43958, yang di mana nilai tersebut lebih rendah dari rata-rata variabel, yang mengartikan bahwa hasil penyebaran data berindikasi baik.

3. Uji Asumsi Klasik

Pengujian asumsi klasik menjadi tahapan fundamental dalam memastikan kelayakan model yang akan dianalisis. Hal ini disebabkan oleh perlunya data yang dimasukkan ke dalam model regresi berganda untuk tunduk pada prasyarat tertentu. Beberapa bentuk pengujian asumsi klasik tersebut meliputi:

a. Uji Normalitas

Pengujian normalitas dilakukan guna menelaah apakah data yang digunakan telah mengikuti pola distribusi normal. Distribusi yang normal dianggap ideal karena mampu mereduksi kemungkinan terjadinya deviasi dalam analisis. Pada penelitian ini, pengujian distribusi dilakukan melalui metode *Kolmogorov-Smirnov*, di mana data dinyatakan berdistribusi normal apabila nilai signifikansi (K-S) melebihi angka 0.05.

Tabel 4.4 Hasil Uji Normalitas

Variabel	Asym. Sig. (2-tailed)
Sampel Kolmogorov-Smirnov	0.076

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Tabel 4.4 menyajikan hasil analisis yang mengindikasikan bahwa penelitian ini melibatkan 60 sampel data. Distribusi data tersebut menunjukkan kecenderungan mengikuti pola normal, sebagaimana ditunjukkan oleh nilai *Kolmogorov-Smirnov* yang berada di atas ambang signifikansi, yakni sebesar 0.076. Nilai ini mengonfirmasi bahwa data berdistribusi normal dan memenuhi asumsi dasar regresi.

b. Uji Multikolinearitas

Pengujian multikolinearitas bermaksud untuk mengidentifikasi potensi kesamaan atau hubungan linear yang tinggi antar variabel independen dalam suatu model regresi. Dalam model regresi yang ideal, antar variabel bebas seharusnya tidak menunjukkan korelasi yang signifikan. Untuk menilai ada tidaknya multikolinearitas, digunakan indikator *Tolerance* dan *Variance Inflation Factor* (VIF). Apabila nilai *Tolerance* berada di atas 0.10 dan VIF berada di bawah angka 10, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat indikasi multikolinearitas di antara variabel independen yang diaplikasikan dalam model.

Tabel 4.5 Hasil Uji Multikolinearitas

Variabel	<i>Tolerance</i>	VIF
PKB	0.602	1.660
BBNKB	0.562	1.781
PBBKB	0.427	2.342
Retribusi Parkir	0.509	1.963

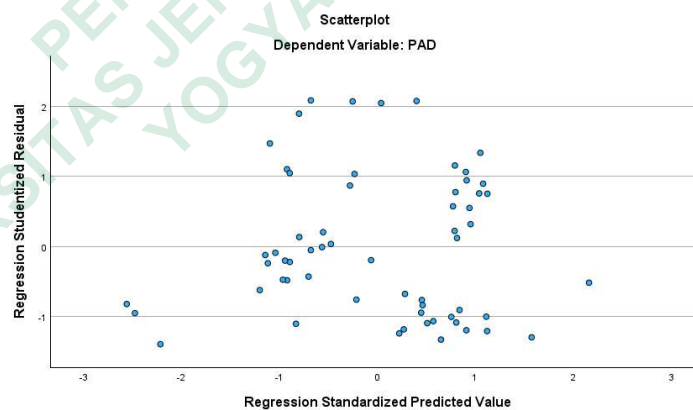
Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Tabel 4.5 mempertegas bahwa semua variabel memenuhi kriteria bebas multikolinieritas, ditandai dengan nilai *Tolerance* di atas 0.10 dan VIF di bawah 10. Dengan demikian, model antar variabel dinyatakan bebas dari gejala multikolinieritas.

c. Uji Heteroskedastisitas

Pengujian heteroskedastisitas dilakukan guna mengevaluasi apakah terdapat ketidakkonsistenan varian residual antar observasi dalam model regresi. Pada penelitian ini, metode *scatterplot* digunakan sebagai alat bantu dalam mendeteksi gejala tersebut. Apabila sebaran titik pada *scatterplot* tampak acak, tidak membentuk pola tertentu, serta tersebar secara merata di atas dan di bawah garis nol pada sumbu Y, maka dapat disimpulkan bahwa tidak terjadi heteroskedastisitas. Visualisasi hasil pengujian *scatterplot* disajikan pada gambar berikut:

Gambar 4.1 Uji Heterokedastisitas



Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Berdasarkan gambar tersebut, tidak tampak pola yang sistematis, sebaran titik terlihat acak dan tersebar di sekitar sumbu Y, baik di atas maupun di bawah angka nol. Sehingga, dapat disimpulkan bahwa data ini tidak menunjukkan adanya indikasi heteroskedastisitas.

d. Uji Autokorelasi

Pengujian autokorelasi diselenggarakan guna mengamati keberadaan korelasi temporal antara galat (*error*) pada periode sebelumnya ($t-1$) dengan galat pada periode saat ini dalam model regresi linier. Jika ditemukan adanya keterkaitan tersebut, maka dapat diindikasikan bahwa model mengalami permasalahan autokorelasi. Gejala ini umumnya muncul ketika nilai residual menunjukkan pola yang berkesinambungan antar waktu. Dalam penelitian ini, deteksi autokorelasi dilakukan dengan menerapkan uji *Durbin-Watson*. Hasil dari pengujian tersebut ditampilkan pada tabel berikut:

Tabel 4.6 Hasil Uji Autokorelasi

dL	dU	DW	4-Du	4-dL
1.4443	1.7274	2.036	2.2726	2.5557

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Merujuk pada Tabel 4.6, nilai *Durbin-Watson* (DW) yang dihasilkan adalah sebesar 2.036. Berdasarkan kriteria pengujian autokorelasi, kondisi bebas autokorelasi tercapai apabila nilai DW berada di antara batas atas (dU) dan nilai 4 dikurangi dU, yaitu dalam interval $1.7274 < 2.036 < 2.2726$. Karena nilai DW terletak dalam rentang tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa model regresi dalam penelitian ini tidak mengindikasikan adanya gejala autokorelasi.

4. Pengujian Hipotesis

a. Uji Simultan (Uji F)

Uji F, yang juga dikenal sebagai pengujian kelayakan model, digunakan untuk mengevaluasi seberapa jauh struktur model regresi yang dibangun memiliki kemampuan menjelaskan hubungan antar variabel. Pengujian ini bertujuan untuk mengetahui apakah keseluruhan variabel independen secara simultan memberikan

pengaruh terhadap variabel dependen. Dalam konteks penelitian ini, variabel bebas terdiri dari PKB, BBNKB, PBBKB, dan Retribusi Parkir, sedangkan variabel terikatnya adalah PAD. Analisis dilakukan dengan menggunakan tingkat signifikansi sebesar 5%. Nilai F hasil pengujian disajikan pada tabel berikut:

Tabel 4.7 Hasil Uji F

ANOVA ^a						
	Model	Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig
1	Regression	0.631	4	0.158	31.742	<0.001 ^b
	Residual	0.273	55	0.005		
	Total	0.904	59			
a. Dependent Variable: PAD						
b. Predictors: (Constant), Retribusi Parkir, BBNKB, PKB, PBBKB						

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Merujuk pada hasil analisis data yang ditunjukkan dalam Tabel 4.7, nilai F-hitung tercatat sebesar 31.742 dengan tingkat signifikansi kurang dari 0.001. Mengingat nilai signifikansi tersebut berada di bawah ambang batas 0.05, maka dapat disimpulkan bahwa variabel PKB, BBNKB, PBBKB, dan Retribusi Parkir secara bersamaan berpengaruh signifikan terhadap PAD. Dengan demikian, model regresi yang digunakan dalam penelitian ini dianggap valid dan layak untuk digunakan dalam menjelaskan hubungan antar variabel.

b. Uji koefisien Determinasi (R^2)

Koefisien determinasi dimanfaatkan untuk memberikan ilustrasi sejauh mana kekuatan hubungan antara variabel-variabel yang terlibat dalam model. Nilai ini merefleksikan proporsi variasi dalam variabel dependen yang mampu dijelaskan oleh seluruh variabel independen secara bersama-sama. Untuk memperoleh nilai tersebut, dilakukan perhitungan dengan menggunakan rumus $R^2 \times 100\%$. Hasil

pengujian regresi berganda yang relevan dapat dilihat pada tabel berikut:

Tabel 4.8 Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary ^b				
Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	0.835 ^a	0.698	0.676	0.07048
a. Predictors: (Constant), Retribusi Parkir, BBNKB, PKB, PBBKB				
b. Dependent Variable: PAD				

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Mengacu pada Tabel 4.8, nilai *Adjusted R Square* tercatat sebesar 0.676 atau setara dengan 67.6%. Hal ini mengindikasikan bahwa variabel-variabel PKB, BBNKB, PBBKB, dan Retribusi Daerah secara simultan mampu menjelaskan pengaruh terhadap variabel dependen, yakni PAD sebesar 67.6%. Adapun sisanya, sebesar 32.4%, dipengaruhi oleh variabel lain yang berada di luar cakupan model regresi dalam penelitian ini.

c. Uji Parsial (Uji t)

Uji t digunakan untuk mengetahui sejauh mana masing-masing variabel independen memberikan pengaruh secara parsial terhadap variabel dependen. Sebuah variabel dinyatakan berpengaruh signifikan apabila nilai signifikansi yang diperoleh berada di bawah angka 0.05. Hasil pengujian ini disajikan dalam tabel berikut untuk menunjukkan kontribusi individu dari setiap variabel terhadap model yang dianalisis. Temuan ini menjadi dasar dalam mengevaluasi kekuatan masing-masing variabel dalam menjelaskan variasi pada variabel terikat.

Tabel 4.9 Hasil Uji t

Coefficient ^a						
Model		Unstandardized Coefficient		Standardized Coefficient	t	Sig
		B	Std. Error	Beta		
1	(Constant)	1.349	1.263		1.069	0.290
	PKB	0.333	0.113	0.282	2.952	0.005
	BBNKB	0.291	0.105	0.274	2.770	0.008
	PBBKB	0.277	0.101	0.310	2.734	0.008
	Retribusi Parkir	0.044	0.031	0.148	1.425	0.160
a. Dependent Variable: PAD						

Sumber: Data Sekunder yang diolah, 2025

Melalui sampel yang digunakan yaitu sejumlah 60 dan tingkat signifikansi adalah 0.05 maka didapatkan t-tabel sebesar 2.004. Hasil pengujian sebagaimana tercantum dalam Tabel 4.9 dapat dijabarkan sebagai berikut:

- 1) Variabel PKB menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0.005 < 0.05$ dan nilai t hitung sebesar $2.952 > 2.004$, hal ini menunjukkan bahwa variabel PKB berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
- 2) Variabel BBNKB menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$ dan nilai t hitung sebesar $2.770 > 2.004$, hal ini menunjukkan bahwa variabel BBNKB berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
- 3) Variabel PBBKB menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$ dan nilai t hitung sebesar $2.734 > 2.004$, hal ini menunjukkan bahwa variabel PBBKB berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.
- 4) Variabel Retribusi Parkir menunjukkan hasil signifikansi sebesar $0.160 > 0.05$ dan nilai t hitung sebesar $1.425 < 2.004$, hal ini menunjukkan bahwa variabel Retribusi Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap variabel PAD.

C. Pembahasan

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaruh PKB, BBNKB, PBBKB, dan retribusi parkir terhadap PAD DIY. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu menggunakan data sekunder berupa laporan realisasi bulanan selama 5 periode yaitu 2020 – 2024.

a. Pengaruh Pajak Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Merujuk pada temuan penelitian diketahui bahwa nilai t-hitung sebesar $2.952 > t\text{-tabel } 2.004$ dan nilai signifikansi variabel PKB sebesar $0,005$ lebih rendah jika dibandingkan 0.05 . Dengan demikian, hipotesis H1 diterima. Artinya, PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini menunjukkan bahwa peningkatan penerimaan dari PKB memberikan dampak signifikan terhadap pertumbuhan PAD daerah. Dengan kontribusi yang besar dan bersifat rutin, PKB menjadi salah satu komponen utama dalam struktur penerimaan daerah.

PKB merupakan pajak atas kepemilikan dan/atau penguasaan kendaraan bermotor yang dikenakan kepada wajib pajak perorangan maupun badan. Dalam kerangka teori *Stewardship*, pemerintah sebagai pengelola dana publik memiliki tanggung jawab untuk mengoptimalkan potensi pajak seperti PKB demi kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pendapatan daerah. Pernyataan ini sejalan dengan pandangan Agustini et al. (2022), yang mengemukakan bahwa PKB memiliki potensi yang besar sebagai salah satu tulang punggung penerimaan pajak daerah, mengingat tren pertumbuhan jumlah kendaraan bermotor yang konsisten meningkat dari tahun ke tahun.

Hasil penelitian ini didukung oleh temuan Nurhayati dkk. (2023) yang menyatakan bahwa PKB memiliki pengaruh signifikan terhadap PAD DKI Jakarta. Penelitian oleh Hanifah dkk. (2023) juga menunjukkan bahwa PKB secara parsial memberikan kontribusi besar terhadap PAD di Kota Sukabumi. Selain itu, Irsan dkk. (2024) menemukan bahwa efektivitas pemungutan PKB di beberapa daerah mampu mencapai lebih

dari 100% dari target penerimaan yang ditetapkan, menandakan bahwa potensi PKB dapat dimaksimalkan secara berkelanjutan.

b. Pengaruh Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil pengujian regresi, variabel BBNKB menunjukkan nilai t-hitung sebesar $2.770 > t\text{-tabel } 2.004$ dan nilai signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis H2 diterima yang berarti hasil ini menunjukkan bahwa BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Artinya, peningkatan transaksi kendaraan bermotor, baik baru maupun bekas, berdampak langsung terhadap peningkatan pendapatan dari sektor BBNKB.

BBNKB merupakan pajak yang dikenakan atas peralihan hak kepemilikan kendaraan bermotor sebagai akibat dari jual beli, hibah, warisan, atau sebab lain. Menurut *Stewardship Theory*, pajak ini menjadi cerminan dari tanggung jawab pemerintah dalam mengelola aktivitas ekonomi masyarakat untuk mendukung pembangunan daerah.

Temuan ini diperkuat oleh penelitian Febrilia dkk. (2024) yang menunjukkan bahwa BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Bandar Lampung. Akbar dkk. (2024) juga menyatakan bahwa BBNKB secara parsial berpengaruh terhadap PAD di daerah penelitian mereka. Selain itu, Irsan dkk. (2024) mencatat efektivitas BBNKB yang tinggi di beberapa daerah, melebihi 100%, menunjukkan bahwa sektor ini memiliki potensi besar untuk terus dikembangkan melalui pengawasan dan inovasi pelayanan.

c. Pengaruh Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Pengujian statistik menunjukkan hasil bahwa PBBKB memiliki nilai t-hitung sebesar $2.734 > t\text{-tabel } 2.004$ dan nilai signifikansi sebesar $0.008 < 0.05$. Dengan demikian, hipotesis H3 diterima. Artinya, PBBKB berpengaruh signifikan terhadap PAD. Konsumsi bahan bakar yang tinggi

akibat tingginya mobilitas masyarakat secara langsung meningkatkan penerimaan daerah dari sektor ini.

PBBKB adalah pajak yang dikenakan atas pembelian bahan bakar kendaraan bermotor yang dibebankan kepada konsumen. Dalam *Stewardship Theory*, keberhasilan dalam pemungutan PBBKB menunjukkan kemampuan pemerintah dalam mengelola konsumsi masyarakat sebagai sumber penerimaan daerah yang penting.

Hasil penelitian ini juga dikuatkan oleh penelitian terdahulu yang dilakukan Akbar dkk. (2024) menemukan bahwa PBBKB memiliki pengaruh yang signifikan terhadap PAD, terutama di daerah dengan tingkat konsumsi bahan bakar yang tinggi. Rusli dan Sabri (2023) juga menunjukkan bahwa PBBKB berpengaruh signifikan terhadap PAD.

d. Pengaruh Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil penelitian diketahui nilai t-hitung sebesar 1.425 lebih kecil dari t-tabel 2.004 dan nilai signifikansi sebesar 0.160 lebih besar dari 0.05, yang berarti hipotesis H4 ditolak. Hal ini menunjukkan bahwa variabel retribusi parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY. Meskipun secara nominal retribusi parkir tetap menjadi pemasukan kas daerah, namun kontribusinya tidak cukup besar dan cenderung tidak stabil sehingga secara statistik tidak mampu memengaruhi perubahan PAD secara signifikan. Hal ini menandakan bahwa penerimaan dari retribusi parkir belum memberikan hasil yang optimal dalam meningkatkan PAD daerah.

Retribusi parkir merupakan pungutan yang dikenakan kepada pengguna kendaraan bermotor atas penggunaan fasilitas parkir di tepi jalan atau lokasi khusus yang disediakan oleh pemerintah daerah. Menurut Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, retribusi digolongkan sebagai salah satu sumber PAD, namun efektivitas pengelolaannya sangat tergantung pada sistem administrasi dan pengawasan yang diterapkan. Teori *Stewardship* juga

menyatakan bahwa pemerintah sebagai pengelola sumber daya publik berkewajiban memaksimalkan potensi pendapatan demi kepentingan masyarakat. Dalam hal ini, rendahnya efektivitas pengelolaan retribusi parkir dapat mengindikasikan adanya kelemahan dalam sistem tata kelola dan kontrol terhadap pelaksanaannya di lapangan (Halimatussadiyah dkk., 2022). Lebih lanjut Algadri dkk. (2022), yang menyebutkan bahwa kelemahan sistem pemungutan dan minimnya digitalisasi menjadi penghambat utama dalam optimalisasi retribusi parkir sebagai sumber pendapatan daerah.

Temuan dalam penelitian ini selaras dengan kajian sebelumnya oleh Hawa dkk. (2024) yang menemukan bahwa retribusi parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD. Oktaviani dkk. (2024), yang membandingkan pajak parkir dengan retribusi parkir dalam memengaruhi PAD. Hasilnya menunjukkan bahwa retribusi parkir memiliki kontribusi yang rendah dan tidak signifikan terhadap PAD karena sistem pemungutannya yang masih manual dan rawan kebocoran.

e. Pengaruh PKB, BBNKB, PBBKB, dan Retribusi Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah

Berdasarkan hasil analisis regresi simultan menggunakan uji *F*, diketahui bahwa nilai *F-hitung* sebesar 31.742 dan nilai signifikansi sebesar < 0.001 , yang artinya lebih kecil dari 0.05. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa keempat variabel independen, yaitu PKB, BBNKB, PBBKB, dan Retribusi Parkir, secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY. Artinya, meskipun tidak semua variabel berpengaruh secara parsial, namun secara bersamaan keempatnya mampu menjelaskan variasi yang terjadi pada PAD. Hasil ini menunjukkan bahwa kontribusi seluruh sumber pendapatan daerah dari sektor transportasi dan layanan publik memiliki keterkaitan kuat terhadap peningkatan PAD secara keseluruhan.

32 Secara teori, ketika variabel independen diuji secara bersamaan dan memberikan pengaruh yang signifikan terhadap variabel dependen, hal tersebut menunjukkan bahwa kombinasi seluruh komponen memiliki kekuatan penjelas yang baik dalam model regresi (Ghozali, 2021). Dalam *Stewardship Theory*, hal ini menggambarkan bagaimana pemerintah bertanggung jawab untuk memanfaatkan semua potensi sumber daya daerah—baik yang memiliki pengaruh dominan maupun tidak—untuk mendukung pembiayaan daerah secara kolektif dan berkelanjutan. Menurut Halim (2020), sumber PAD dari sektor pajak kendaraan dan jasa layanan publik bersifat saling melengkapi dan memberikan sinergi fiskal yang dapat mendorong kemandirian daerah.

8 Hasil penelitian ini didukung oleh Hanifah dkk. (2023) yang menyatakan bahwa PKB, BBNKB, dan PBBKB secara simultan berpengaruh signifikan terhadap PAD di Kota Sukabumi. Penelitian yang dilakukan oleh Akbar dkk. (2024) menunjukkan pajak daerah (PKB, BBNKB, PBBKB, pajak air permukaan, dan pajak rokok) berpengaruh terhadap pendapatan asli daerah. Penelitian oleh Febrilia dkk. (2024) juga menunjukkan bahwa kombinasi antara pajak kendaraan dan penerimaan jasa layanan pemerintah berpengaruh signifikan terhadap PAD Kota Bandar Lampung.

9

18

7

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Meninjau hasil analisis dan pembahasan yang telah dilakukan, maka diperoleh simpulan sebagai berikut:

1. Variabel PKB berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY. Semakin tinggi penerimaan dari PKB, maka semakin tinggi pula kontribusinya terhadap peningkatan PAD. Hal ini menunjukkan bahwa PKB merupakan sumber pajak potensial yang dapat diandalkan oleh pemerintah daerah.
2. Variabel BBNKB berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY. Peningkatan aktivitas jual beli kendaraan bermotor berdampak pada meningkatnya penerimaan BBNKB, yang pada akhirnya berkontribusi terhadap peningkatan PAD di daerah.
3. Variabel PBBKB berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY. Semakin tinggi konsumsi bahan bakar oleh masyarakat, semakin besar pula kontribusi PBBKB dalam mendukung kemandirian fiskal pemerintah daerah.
4. Variabel Retribusi Parkir tidak berpengaruh signifikan terhadap PAD DIY. Hal ini menunjukkan bahwa meskipun retribusi parkir memberikan pemasukan, namun jumlah dan efektivitasnya belum cukup kuat untuk memengaruhi PAD secara signifikan.
5. Secara simultan, variabel PKB, BBNKB, PBBKB, dan retribusi parkir berpengaruh signifikan terhadap PAD. Hal ini dibuktikan melalui hasil uji F dengan nilai signifikansi < 0.001 , yang menunjukkan bahwa keempat variabel bersama-sama dapat menjelaskan variasi yang terjadi pada PAD.
6. Nilai koefisien determinasi (*Adjusted R Square*) sebesar 0.676 menunjukkan bahwa sebesar 67.6% variasi yang terjadi pada PAD dapat dijelaskan oleh keempat variabel independen, yaitu PKB, BBNKB,

11 PBBKB, dan retribusi parkir. Sementara itu, sisanya sebesar 32.4% dijelaskan oleh variabel lain yang tidak diteliti dalam penelitian ini.

18 B. Keterbatasan Penelitian

Penelitian ini tentu memiliki beberapa keterbatasan yang perlu diperhatikan untuk menjadi pertimbangan dalam interpretasi hasil dan pengembangan penelitian selanjutnya, antara lain:

- 5 a. Penelitian hanya mengandalkan data sekunder yang diperoleh dari instansi terkait, sehingga akurasi hasil sangat bergantung pada kelengkapan dan keakuratan data yang disediakan.
- 18 b. Tidak dilakukan survei atau wawancara lapangan untuk memverifikasi data, sehingga analisis sepenuhnya berdasarkan dokumen resmi tanpa konfirmasi kondisi faktual di lapangan.
- 87 c. Faktor eksternal seperti perubahan regulasi, kondisi ekonomi makro, atau keadaan darurat (misalnya pandemi) tidak dianalisis secara mendalam, meskipun berpotensi memengaruhi variabel yang diteliti.

5 C. Saran

18 Mengacu pada dasar hasil penelitian dan keterbatasan yang telah diuraikan sebelumnya, maka saran yang dapat diberikan dalam penelitian ini dibagi kepada dua pihak, yaitu:

87 1. Bagi Pemerintah Daerah

- a. Pemerintah daerah diharapkan dapat terus mengoptimalkan pengelolaan dan pengawasan terhadap sumber-sumber PAD yang telah terbukti signifikan seperti PKB, BBNKB, PBBKB. Upaya yang dapat dilakukan meliputi peningkatan pelayanan kepada wajib pajak, digitalisasi sistem pembayaran, dan transparansi pengelolaan.
- b. Pemerintah daerah juga perlu mengevaluasi sistem pengelolaan retribusi parkir, mengingat hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel ini belum memberikan kontribusi signifikan terhadap PAD. Pembenahan dapat dilakukan melalui penerapan sistem non-tunai,

penggunaan aplikasi parkir, serta pengawasan lapangan yang lebih ketat untuk mencegah adanya parkir liar.

2. Bagi Akademisi

- a. Penelitian ini dapat menjadi referensi bagi akademisi dalam mengembangkan kajian-kajian sejenis di bidang keuangan daerah, khususnya yang berkaitan dengan optimalisasi penerimaan daerah dari sektor pajak dan retribusi.
- b. Disarankan kepada peneliti selanjutnya untuk memperluas cakupan variabel yang diteliti agar hasil penelitian lebih komprehensif. Variabel tambahan yang dapat dipertimbangkan antara lain: pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, pajak reklame, pajak air tanah, serta pendapatan dari BUMD dan retribusi jasa usaha.
- c. Penelitian selanjutnya juga disarankan menggunakan metode *mixed methods* (gabungan kuantitatif dan kualitatif), misalnya dengan melakukan wawancara mendalam kepada pengelola pajak daerah, sehingga dapat menggambarkan kondisi lapangan secara lebih utuh, terutama untuk menjelaskan kendala pengelolaan retribusi yang tidak signifikan secara statistik.